



KR-Antara/Mohammad Ayudha

KERAJINAN MAINAN BAMBU: Perajin memproduksi kerajinan mainan dari bambu di Desa Jetis, Krajan, Weru, Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (6/1). Kerajinan mainan tersebut dijual di wilayah Solo Raya hingga Semarang dengan harga Rp 10.000-Rp 50.000.

KASUS SUAP IZIN EKSPOR BENIH LOBSTER Ainul Dicecar Soal Penampungan Uang

JAKARTA (KR) - Pemeriksaan yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ainul Faqih, staf Anggota DPR RI Iis Rosita Dewi, mencecar perihal adanya penampungan uang di rekening bank dan kartu ATM yang diduga berasal dari suap izin ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dalam kasus ini, Ainul juga merupakan salah satu tersangka.

"Yang bersangkutan dikonfirmasi tentang pengetahuannya mengenai adanya rekening bank dan kartu ATM yang diduga sebagai penampungan uang yang diduga berasal dari pihak eksportir benih lobster. Uang-uang itu diduga dipergunakan untuk kepentingan tersangka EP," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (6/1).

Untuk diketahui juga, Iis adalah istri mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (EP) yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Penyidik, kata Ali, memeriksa Ainul pada Selasa (5/1) dalam kapasitasnya sebagai saksi. Selain Ainul, KPK juga telah memeriksa saksi Johan dari unsur swasta PT Sentosa Bahari

Sukses dalam penyidikan kasus tersebut. "Johan dari pihak swasta, yakni PT Sentosa Bahari Sukses, dikonfirmasi mengenai pengetahuannya terkait perizinan dan pengiriman benih lobster di KKP dan digali lebih lanjut soal dugaan adanya setoran uang kepada PT ACK (Aero Citra Kargo)," ungkap Ali.

Ditambahkan, KPK juga menginformasikan seorang saksi yang tidak memenuhi panggilan pada Selasa (5/1), yakni karyawan swasta Chandra Astan. Ketidakhadiran saksi, menurut Ali, karena sakit.

Sebelumnya, juga memanggil dua karyawan swasta, Johan dan Chandra Astan sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap izin ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). "Keduanya dijadwalkan diperiksa untuk tersangka SJT (Suharjito/Direktur PT Dua Putra Perkasa/DPP)," kata Ali Fikri. Untuk saksi Chandra yang juga Direktur PT Grahafoods Indo Pasifik itu, sebelumnya tidak memenuhi panggilan KPK pada 28 Desember 2020 dan dijadwalkan ulang pemanggilannya Selasa ini. **(Ful)-f**

VAKSI COVID-19 DIDISTRIBUSIKAN KE 34 PROVINSI

Puskesmas Kesulitan Fasilitas, Segera Laporkan

JAKARTA (KR) - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Pemerintah telah mendistribusikan 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 ke 34 provinsi di seluruh Indonesia.

"Pengiriman vaksin dilakukan secara bertahap dimulai 3 Januari dan ditargetkan selesai terdistribusi ke 34 provinsi 7 Januari," ujar Menkes usai Rapat Terbatas Penanganan Pandemi Covid-19 dan Rencana Pelaksanaan Vaksinasi, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/1).

Mengenai pelaksanaannya, Budi menjelaskan, vaksinasi direncanakan minggu kedua Januari 2021, setelah dikeluarkannya Izin Penggunaan Darurat (*Emergency Use Authorization/EUA*) oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). "Kami merencanakan dalam jangka waktu 15 bulan bisa menyelesaikan vaksinasi kepada 181 juta rakyat Indonesia," ujar-

nya. Namun Menkes mengungkapkan, pihaknya akan bekerja keras untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi tersebut. "Kami akan berusaha keras dan kami butuh dukungan teman-teman untuk melakukan hal ini," tuturnya.

Budi juga meminta media massa dapat ikut membantu mengingatkan seluruh Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes) baik Puskesmas, rumah sakit, dan klinik untuk segera mendaftar ke aplikasi PCare (Primary Care) BPJS agar dapat melayani vaksinasi Covid-19. "Tolong dikomunikasikan terus ke mereka untuk mendaftarkan, karena kalau belum mendaftarkan akan sulit bagi mereka untuk bisa melayani vaksi-

nasi ini, terutama untuk mencatat dan menangani kalau ada Kejadian Ikutan Pascaimunisasi (KIP)," ujarnya.

Di samping itu, untuk mengingatkan kepada Fasyankes menyampaikan keperluan terkait vaksinasi. "Kami juga mohon bantuan teman-teman wartawan untuk mengingatkan seluruh Puskesmas kalau misalnya ada fasilitas lemari es atau pendingin yang kurang untuk menyimpan vaksin, tolong segera mengontak Dinas Kesehatan terdekat, tolong kontak Kementerian Kesehatan aparat yang terdekat, kalau perlu juga bisa dikirimkan ke Twitter dan Instagram saya atau Facebook saya, supaya kami bisa cepat menanganinya," pintanya.

Menkes juga mengimbau masyarakat untuk mengurangi mobilitas agar dapat menekan lonjakan kasus Covid-19, mengurangi tekanan pada Fasyankes, dan tentu saja

untuk menjaga dan melindungi tenaga kesehatan. "Tolong bantu mereka, kurangi mobilitas teman-teman sejak 11 Januari selama dua minggu dan jangan lupa memakai masker, sekali lagi jangan lupa memakai masker. Itu adalah hal yang sangat penting, selain mencuci tangan dan menjaga jarak," tandasnya.

Presiden Joko Widodo juga mengingatkan masyarakat agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun meskipun nantinya sudah diberikan vaksin Covid-19. "Titip ini kepada tetangga, saudara, teman semua, meski vaksinasi sudah dilakukan, tetap yang namanya 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan tetap harus kita lakukan, harus disiplin," kata Presiden. **(Sim/Ati)-f**

KEMENHUB SIAPKAN STRATEGI

Disepakati 2023 Bebas ODOL

JAKARTA (KR) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan Program Bebas Over Dimensi dan Over Load (ODOL) pada tahun 2023. Semua jajaran Ditjen Perhubungan Darat pun diminta untuk tetap fokus melakukan berbagai upaya untuk mensukseskan program tersebut.

"Dalam melakukan *law enforcement* untuk ODOL ini kita memang mesti fokus. Pada tahun ini kita akan buat MoU dengan pihak terkait seperti Kementerian PUPR dan Polri agar ini bisa diterapkan secara penuh pada tahun 2023," jelas Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di Jakarta, Rabu (6/1).

Selanjutnya Menhub meminta kepada seluruh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) untuk tetap konsisten melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan, seperti misalnya melakukan pemotongan kendaraan. "Dengan kita tetap konsisten, masyarakat khususnya para pengemudi, pemilik truk, pelaku usaha dan pihak-pihak lainnya mengetahui bahwa Pemerintah secara tegas melarang kendaraan dengan muatan ODOL untuk beroperasi," katanya.

Sesuai hasil rapat koordinasi terkait angkutan mobil barang ODOL pada 2020 bersama stakeholder, telah disepakati untuk menetapkan pelarangan angkutan ODOL akan berlaku penuh mulai awal 2023. Kesepakatan tersebut rencananya dituangkan dalam bentuk MoU pada tahun ini. **(Imd)-f**

BBTKLPP YOGYAKARTA TERIMA 1 UNIT MOBIL LAB Sasar Daerah Kasus Covid-19 Tinggi

YOGYA (KR) - Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta menerima satu unit mobil laboratorium dari Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan. Rencananya mobil tersebut akan difungsikan sebagai laboratorium tambahan. Dengan mobilitas lebih tinggi karena dapat menyalur beberapa tempat.

"Nanti mobil tersebut bisa membantu pelayanan di wilayah layanan BBTKLPP Yogyakarta di DIY dan Jawa Tengah. Mobil laboratorium bergerak surveilans ini difokuskan untuk kasus Covid-19. Diharapkan dapat dioperasionalkan mulai pertengahan Januari 2021 nanti. Saat ini masih ada beberapa kesiapan yang harus dilakukan," kata Kepala BBTKLPP Yogyakarta Dr dr Irene MK, Rabu (6/1).

Irene mengungkapkan, mobil lab itu akan diarahkan ke daerah-daerah yang memiliki lonjakan kasus Covid-19. Sampel yang diterima mobil lab akan langsung diproses, sehingga hasilnya lebih cepat diterima. Tidak perlu mengirim ke lab di BBTKLPP. Mobil tersebut juga dapat digunakan untuk deteksi penyakit lainnya seperti TBC, demam berdarah

dan lain-lain.

Mengenai kasus Covid-19 di DIY, Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19 Berty Murtiningsih menyampaikan, terdapat penambahan 272 kasus positif, sehingga total menjadi 13.612 kasus. Sebagian besar berdomisili di Kabupaten Bantul 97 orang, Sleman 92, Kota Yogyakarta 31, Kulonprogo 30 dan Gunungkidul 22 orang.

Untuk pasien sembuh, bertambah 290 menjadi 9.192 kasus. Sebagian besar berdomisili di Bantul 111 orang, Kota Yogya 100, Sleman 39, Kulonprogo 22 dan Gunungkidul 18 orang. Sementara kasus meninggal bertambah empat kasus menjadi 297 kasus.

Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes DIY ini menambahkan, jumlah tempat tidur (TT) di 27 RS Rujukan Covid-19 di DIY masih tersisa baik yang kritis sebanyak 23 bed dan nonkritis 762 bed. Jumlah sampel diperiksa sebanyak 1.227 dari 1.181 orang. Case recovery rate (CRR) atau tingkat kesembuhan 67,53 persen dan case fatality rate (CFR) atau tingkat fatalitas kasus pasien terkonfirmasi positif Covid-19 2,18 persen.

(Ria/Ira)-d

Defisit APBN 2020 Rp 956,3 Triliun

JAKARTA (KR) - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama 2020 sebesar Rp 956,3 triliun atau sekitar 6,09 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka defisit ini lebih rendah dari yang ditargetkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 72 Tahun 2020 sebesar Rp 1.039,2 triliun atau sekitar 6,34 persen dari PDB.

"Defisit APBN selama 2020 lebih rendah Rp 82,9 triliun dari Rp 1.039,2 triliun dalam Perpres No 72/2020 menjadi Rp 956,3 triliun atau sekitar 6,09 persen PDB," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers realisasi APBN 2020 secara virtual, di Jakarta, Rabu (6/1).

Pada awal 2020, APBN Indonesia didesain dalam kondisi sehat yaitu hanya defisit 1,76 persen atau Rp 307,2 triliun lebih rendah dari tahun lalu 2,2 persen.

"APBN 2020 awalnya didesain menjadi sebuah APBN yang sehat mendukung ekonomi. Namun mengalami konsolidasi atau perbaikan biaya dimana keseimbangan primer nyaris 0 persen atau hanya Rp 12

triliun. Dengan adanya pandemi terjadi perubahan yang luar biasa naik dari 1,76 persen menjadi 6,09 persen atau Rp 307,2 triliun menjadi Rp 956,3 triliun dan dengan demikian keseimbangan primer kita juga mengalami lonjakan dari yang tadinya kita bisa hanya Rp 12 triliun menjadi Rp 642,2 triliun. Ini menunjukkan bahwa APBN pekerjaan luar biasa sehingga memang harus kita jaga ke depannya," kata Menkeu.

Kalau dibandingkan negara lain, defisit anggaran Indonesia lebih kecil. Misalnya Prancis mendekati 11 persen, China kontraksinya mendekati 12 persen, India kontraksi fiskalnya sampai 13,1 persen. Di negara-negara di ASEAN juga sama meningkat cukup tajam, misalnya Malaysia 6,5 persen, Filipina 8,1 persen, Singapura defisit 10,8 persen dan Thailand 5,2 persen.

Sri Mulyani mengatakan, akibat defisit anggaran yang membengkak, maka proyeksi utang publik juga mengalami kenaikan, di berbagai negara bahkan sudah menembus 100 persen dan sebagian besar lagi di atas 60 persen. Misalnya Amerika

Serikat, Prancis sudah di atas 2 tahun ini untuk utang publiknya di atas itu. Kemudian Jerman, China dan India di atas 50 persen, Malaysia dan Singapura juga di atas 100 persen.

"Berbagai negara lain yang mayoritas kenaikan dari utang publiknya melonjak cukup tajam pada tahun ini diperkirakan juga pada tahun depan. Kalau Indonesia juga terjadi kenaikan dari utang publik diperkirakan sekitar 38 persen," tegasnya.

Dikatakan, selama 2020 total pendapatan negara Rp 1.633,6 triliun. Angka ini adalah 96,1 persen dari target yang ditetapkan dalam Perpres No 72/2020 dan 16,7 persen di bawah realisasi 2019. Penerimaan pajak tercatat Rp 1.070 triliun atau 89,3 persen dari target dan 19,7 persen di bawah pencapaian tahun sebelumnya. Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 212,8 triliun, 3,5 persen di atas target Perpres No 72/2020. tetapi 0,3 persen di bawah realisasi 2019. Kemudian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 338,5 triliun atau 115,1 persen dari target. **(Lmg)-d**

SELAMA 2020, KARENA COVID-19

172.000 WNI Direpatriasi dari LN

JAKARTA (KR) - Sebanyak 172.000 warga negara Indonesia (WNI) direpatriasi dari luar negeri karena terdampak pandemi Covid-19 sepanjang 2020. "Lebih dari setengah juta pembako telah diberikan (kepada WNI yang terimbas pandemi) dan lebih dari 2.400 WNI yang terpapar Covid-19 di luar negeri didampingi," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Capaian politik luar negeri di bidang perlindungan WNI tersebut disampaikan Retno Marsudi dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2021 yang diselenggarakan secara virtual di Jakarta, Rabu (6/1). Selain itu, kata Retno Marsudi, selama 2020 Kementerian Luar Negeri telah menangani 54.000 kasus terkait WNI di luar negeri, menyelamatkan 17 WNI dari ancaman hukuman mati, serta membebaskan empat WNI dari penyanderaan.

Kemenlu RI juga membantu memperjuangkan Rp 103,8 miliar hak finansial pekerja migran Indonesia.

Upaya perlindungan WNI, menurut Menlu Retno, bahkan dilakukan sampai pengaturan (*norm setting*) di tingkat global. "Atas inisiatif Indonesia, dan didukung 71 negara anggota PBB, pada 1 Desember 2020, Sidang Majelis Umum PBB secara konsensus telah mengesahkan resolusi mengenai anak buah kapal atau *seafarers* di masa pandemi," jelas Retno.

Untuk tahun ini, perlindungan WNI akan kembali menjadi prioritas dalam politik luar negeri RI, di antaranya melalui penguatan infrastruktur perlindungan WNI oleh Perwakilan-perwakilan RI di luar negeri. Infrastruktur yang dimaksud mencakup pemberian dukungan anggaran perlindungan khususnya penanganan Covid-19, pembangunan

Perwakilan Perlindungan Terpadu (PPT) sesuai mandat Permenlu Nomor 5 Tahun 2018, dan peningkatan status Konsulat RI di Tawau menjadi KJRI.

Bersamaan dengan itu, sistem perlindungan untuk WNI anak buah kapal (ABK) dari hulu hingga hilir akan ditingkatkan, antara lain melalui pembentukan peta ratifikasi ILO C-188 Work in Fishing Convention, MoU penempatan khusus ABK perikanan dengan negara tujuan, serta pemanfaatan perjanjian bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) untuk penegakan hukum yang tegas bagi pelaku.

Kemenlu juga akan melanjutkan upaya membangun Satu Data Indonesia dengan memperkuat data WNI yang akurat melalui pemutakhiran secara serempak di seluruh perwakilan dan dengan wadah Portal Peduli WNI. **(Ant)-d**



KR-Antara/Okky Lukmansyah

KASUR MURAH: Warga mengamati aneka kasur murah di sentra industri pembuatan kasur Desa Grobog Kulon, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Rabu (6/1). Kasur berharga murah berbahan kayu, busa, dan kardus yang viral di media sosial dan dipasarkan ke Pekalongan, Pemalang, dan Brebes tersebut dijual di tingkat produsen Rp 150.000 perunit.